

## **The Evolution of Political Party in Indonesia: PSI Towards a Digital Party**

### **Evolusi Partai Politik di Indonesia: Studi Kasus PSI Menuju Partai Digital**

Silvanus Alvin<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Multimedia Nusantara, Jl. Scientia Boulevard,  
Tangerang\*  
Email: [silvanus.alvin@umn.ac.id](mailto:silvanus.alvin@umn.ac.id)

Masuk tanggal : 14-04-2022, revisi tanggal : 09-11-2022, diterima untuk diterbitkan tanggal : 20-11-2022

---

#### **Abstract**

*Internet penetration and technological developments have transformed society into a digital community. Political communication cannot run stagnant but continues to advance following developments. In Europe, this digitalization phenomenon gave birth to a new form in the political field, namely the birth of digital parties. The term digital party cannot be applied to political parties that use social media as a means of communication, but rather a party that upholds and applies digital philosophy in its internal and external communication. Paolo Gerbaudo sparked the idea of a Digital Party with five main criteria: cloud-based parties, participationism, hyperleader, superbase and plebiscitarianism 2.0. The main goal of digital parties is to empower people in an idealistic democratic sphere. In Indonesia, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) is well-known as a political party filled with youngsters and uses digital apps for political communication. After the 2019 General Election ended and failed to enter the central parliament (DPR RI), PSI presented a digital platform called the Solidarity Application for the public. The Solidarity Apps is expected to bring PSI's elected district legislative members (DPRD) closer to the public. PSI is the first political party to present this digital medium to the public. This qualitative case study research examines three things academically: Firstly, why does PSI use the Solidarity Application as a form of political communication? Secondly, knowing the use of the Solidarity Application. Lastly, understanding PSI's position within the framework of the Digital Party concept of Paulo Gerbaudo. The researcher conducted in-depth interviews with Director of Digital Platform of PSI, Sigit Widodo and a Member of the District Legislative from PSI, Yoel Yosaphat. This paper argues that PSI cannot yet be categorized as a digital party. Nonetheless, PSI is already in the right direction to evolve as a digital party in Indonesia because evolution is a process that takes time. Several obstacles in the pursuit of a digital party are discussed.*

**Keywords:** digital democracy, digital party, political communication, PSI

## Abstrak

Penetrasi internet dan perkembangan teknologi telah mengubah masyarakat menjadi komunitas digital. Komunikasi politik tidak bisa berjalan stagnan tetapi terus maju mengikuti perkembangan. Di Eropa, fenomena digitalisasi ini melahirkan bentuk baru di bidang politik, yakni kelahiran partai digital. Istilah partai digital tidak dapat diterapkan pada partai politik yang menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi, melainkan partai yang menjunjung tinggi dan menerapkan filosofi digital baik dalam komunikasi internal maupun eksternalnya. Paolo Gerbaudo (2019a, 2019b) mencetuskan lima kriteria dalam Partai Digital, yaitu partai berbasis cloud, partisipasi, hyperleader, superbase dan plebiscitarianism 2.0. j utama partai digital adalah untuk memberdayakan masyarakat dalam iklim demokrasi yang ideal. Di Indonesia, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkenal sebagai partai politik dengan label partai anak muda di mana partai ini menggunakan aplikasi digital untuk komunikasi politik. Setelah hasil tidak memuaskan pada Pemilu 2019 lalu, PSI menghadirkan platform digital bernama Aplikasi Solidaritas. Aplikasi Solidaritas ini diharapkan dapat mendekatkan anggota legislatif daerah (DPRD) terpilih PSI ke publik. Dalam aplikasi tersebut terdapat informasi kegiatan anggota legislatif PSI dan fitur pelaporan publik untuk anggota legislatif. PSI menjadi partai politik pertama yang menghadirkan media digital ini ke publik. Penelitian studi kasus kualitatif ini berusaha mengkaji tiga hal secara akademis: Mengetahui alasan PSI menggunakan Aplikasi Solidaritas sebagai bentuk komunikasi politik; Mengetahui penggunaan Aplikasi Solidaritas; Memahami posisi PSI dalam kerangka konsep Partai Digital Paulo Gerbaudo. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan Direktur Digital PSI Sigit Widodo dan anggota DPRD dari PSI, Yoel Yosaphat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PSI belum bisa dikategorikan sebagai partai digital. Meski demikian, PSI sudah berada di jalur yang tepat untuk menjadi partai digital pertama di Indonesia karena evolusi adalah proses yang membutuhkan waktu. Dalam penelitian ini dibahas pula hambatan PSI menuju partai digital.

**Kata Kunci:** demokrasi digital, komunikasi politik, partai digital, PSI

## Pendahuluan

Keberadaan media di sistem demokrasi begitu esensial dalam komunikasi politik (Alvin, 2022). McNair (2017) menempatkan media sebagai penghubung antara partai politik dan publik. Namun, dalam konteks ini, McNair masih menitikberatkan media dalam kategori media arus utama yang melahirkan produk-produk jurnalistik. Realita di lapangan, pemanfaatan media kini sudah bergeser dari media arus utama ke media sosial (Alvin, 2022).

Pergeseran tersebut merupakan keniscayaan. Keberadaan internet dan perkembangan teknologi komunikasi telah membuat masyarakat umum menjadi masyarakat digital (Kuswarno, 2017). Sebanyak 202,6 juta dari total 274 juta penduduk Indonesia telah terkoneksi internet dan menghabiskan waktu hampir sembilan jam di dunia maya (Kemp, 2021). Sementara itu, pengguna media sosial mencapai 170 juta dengan 64,8% pengguna berada di rentang umur 18-34 tahun (Kemp, 2021). Angka-angka tersebut akan terus bertambah seiring waktu berjalan.

Partai politik juga perlu beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi. Pesan-pesan politik digaungkan tidak hanya secara luring, melainkan juga daring. Terdapat tiga level potensi digitalisasi komunikasi politik bagi partai politik, yakni level intra-partai, dalam memfasilitasi komunikasi antar anggota partai; level inter-partai, dalam pemanfaatan teknologi dalam kompetisi politik; dan level sistemik, di mana partai politik mengatur ulang organisasi mereka berdasar pada peluang yang muncul dari perkembangan teknologi (Calderaro, 2014; Chadwick, 2006).

Meski demikian, hingga saat ini, pemanfaatan teknologi dalam ranah komunikasi politik masih dijalankan dengan pola tradisional, di mana lebih menitikberatkan pada komunikasi satu arah. Komunikasi yang terjadi lebih banyak berasal dari institusi politik kepada publik saja. Beberapa penelitian komunikasi politik di Indonesia membuktikan bahwa media sosial hanya digunakan sebagai sarana untuk praktik marketing politic atau political branding (Setianto, 2020), seperti pembentukan citra partai politik atau politisi, penyebaran informasi, menarik perhatian atau simpati (Alam, 2019, 2021; Alfiyani, 2018; Alvin, 2019; Anshari, 2013; Saptanti, 2020). Penelitian komunikasi politik di Indonesia sedikit menyentuh level intra dan level sistemik.

Terdapat salah satu partai politik baru di Indonesia, yakni Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang didirikan pada 16 November 2014. Partai tersebut identik dengan label: “partainya anak muda” (Abdulsalam, 2018) dan bergerak lebih banyak di dunia maya untuk komunikasi politiknya (Alam, 2019, 2021; Partai Solidaritas Indonesia, 2021). Pada Pemilu 2019 lalu, PSI tidak lolos ambang batas parlemen dengan perolehan 2,6 juta suara atau 1,89% perolehan suara (Halim, 2019). Dengan hasil tersebut, 67 kader PSI memenuhi syarat untuk masuk parlemen di tingkat daerah atau level DPRD (Fadli, 2019).

Walau gagal masuk parlemen, PSI tidak mengubah strategi komunikasi politik mereka. Partai yang kini dipimpin oleh Giring Ganesha itu tetap lebih condong ke arah digital. Perihal keterbatasan dana partai menjadi salah satu penyebab utama. Dana operasional PSI didapatkan dari sumbangan beberapa pengusaha dan publik umum, serta penjual merchandise (Nadlir, 2018). Komunikasi politik melalui media sosial memang cenderung lebih murah karena PSI tidak perlu mengeluarkan biaya untuk setiap konten yang mereka unggah (Alvin, 2019).

Enam tahun setelah berdiri, PSI meluncurkan sebuah mobile apps yang diberi nama Aplikasi Solidaritas (Ramadhan, 2020). Platform digital milik PSI itu diharapkan dapat mendekatkan anggota dewan dari PSI dengan publiknya. Di dalam aplikasi itu, terdapat informasi kegiatan anggota legislatif PSI dan ada pula fitur pelaporan publik kepada anggota legislatif. PSI merupakan partai politik pertama yang menghadirkan medium digital ini kepada publik.

Aplikasi Solidaritas ini memiliki enam fungsi utama, yaitu pertama, memantau jadwal kerja anggota legislatif PSI. Kedua, mengikuti kegiatan anggota PSI. Ketiga, menyampaikan aduan kepada anggota legislatif PSI. Keempat, memberikan masukan yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang anggota legislatif PSI dalam hal legislasi, anggaran dan pengawasan seperti pembahasan RAPBD, Raperda dan lainnya. Kelima, memberikan penilaian

terhadap kinerja anggota legislatif PSI. Terakhir, melaporkan anggota legislatif PSI yang tidak bekerja dengan baik.

Langkah yang dilakukan oleh PSI berkaitan erat dengan konsep Partai Digital. Konsep tersebut dikemukakan oleh Paulo Gerbado (2018) dalam bukunya yang berjudul: *The Digital Party: Political Organisation dan Online Democracy*. Gerbado menuliskan bahwa partai digital adalah partai yang menjadikan platform digital sebagai ujung tombak strategi komunikasi politiknya. Tidak semua partai politik yang memiliki platform digital bisa dikategorikan sebagai partai digital. Hanya partai yang menyentuh level intra, level inter dan level sistemik yang dapat dikategorikan partai digital.

Selain pemanfaatan penuh pada teknologi komunikasi, Gerbaudo (2019; 2018) menulis pra-kondisi dari kelahiran partai digital juga didorong oleh rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik. Sejalan dengan itu, survei-survei terhadap partai politik di Indonesia sejak 2018 hingga 2021, menunjukkan publik tidak mempercayai partai (Fauzi, 2021; Priyasmoro, 2018; Putri, 2021). Secara garis besar, publik tidak merasakan partai mampu menjadi instrumen yang dapat memperjuangkan aspirasi mereka. Lebih lanjut, maraknya kasus korupsi yang melibatkan kader-kader partai makin memicu dan merusak kepercayaan publik.

Gerbaudo (2019; 2018) juga menuliskan bahwa partai terus beradaptasi dari waktu ke waktu. Strategi komunikasi dari partai politik akan berubah sesuai dengan refleksi dari situasi masyarakat sosialnya. Bila masyarakat sudah menjadi masyarakat digital, maka partai pun niscaya akan bergerak menjadi partai digital agar mereka bisa relevan. Bagaimanapun juga partai dibentuk untuk mendapatkan dukungan suara dari publik, yang nantinya dipakai sebagai legitimasi dalam menjalankan politik di suatu negara.

Topik mengenai kehadiran partai digital menarik untuk diteliti dan penelitian ini memiliki nilai tambah karena belum ditemukan penelitian dengan tema serupa di Indonesia. Fokus kajian komunikasi politik di Indonesia secara umum terbagi menjadi tiga yakni manajemen citra maupun semiotika politik (Hartiana et al., 2020; Pratiwi, 2018), diskursus politik (Robin et al., 2020), dan pemasaran politik (Farazian & Paskarina, 2021).

Langkah-langkah yang diambil PSI menunjukkan tendensi ke arah digital. Namun, patut digarisbawahi kembali bahwa komunikasi politik daring tidak serta merta menjadikan sebuah partai menjadi partai digital. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menjawab tiga pertanyaan besar. Pertama, mengetahui alasan PSI menggunakan Aplikasi Solidaritas sebagai salah satu bentuk komunikasi politiknya. Kedua, mengetahui pemanfaatan Aplikasi Solidaritas bagi kepentingan PSI. Ketiga, mengetahui posisi PSI dalam bingkai konsep Partai Digital Paolo Gerbaudo.

### **Komunikasi Politik dan Partai Politik**

Komunikasi politik merupakan upaya-upaya komunikasi yang dilakukan oleh elemen-elemen politik, yakni organisasi politik, media, dan publik, yang dilakukan di iklim demokrasi (McNair, 2017). Cangara (Cangara, 2016, hlm. 30) menambahkan komunikasi politik sebagai ‘suatu proses komunikasi yang memiliki implikasi atau konsekuensi terhadap aktivitas politik’. Bisa disimpulkan bahwa komunikasi politik merupakan segala bentuk komunikasi, baik verbal atau non-verbal, baik secara langsung atau termediasi, dengan tujuan politik tertentu.

Partai politik merupakan bagian dari elemen organisasi politik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 menuliskan partai politik sebagai ‘organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’ (Republik Indonesia, 2011, hlm. 2). Harjanto (2011) menjelaskan bahwa partai politik hadir sebagai tulang punggung dari demokrasi. Sebuah negara tidak dapat disebut sudah menjalankan demokrasi, tanpa kehadiran partai politik di dalamnya (Asshiddiqie, 2006).

Keberadaan partai politik memiliki beberapa fungsi penting (Asshiddiqie, 2006; Harjanto, 2011), yakni menyerap dan menyalurkan aspirasi rakyat, memberikan pendidikan politik, melakukan rekrutmen politik, menyusun dan memperjuangkan kebijakan umum, mengawasi pelaksanaan kebijakan umum, penengah antara pemerintah dan rakyat, dan pengontrol politisi yang memegang jabatan.

Harjanto (2011) mengkritisi keberadaan partai politik di Indonesia belum menerapkan komunikasi bottom-up, baik di internal partai maupun eksternal. Secara umum, dasar dari pengambilan keputusan dalam sebuah partai politik di Indonesia adalah ‘kuatnya peran pimpinan maupun kekuatan oligarki di parpol’ (Harjanto, 2011, hlm. 146). Mengacu pada analisis tersebut, maka bisa ditarik sebuah benang merah komunikasi politik di dalam intra partai terjadi secara satu arah atau top bottom.

Partai politik di Indonesia belum layak disebut tulang punggung demokrasi bila keputusan tersentralisasi di pimpinan. Harjanto (2011, hlm. 149) menuliskan bahwa ‘praktik penyelenggaraan kekuasaan di parpol sangatlah jauh dari nilai-nilai demokrasi karena kuatnya subyektivitas dan kepentingan politik sempit figur dominan maupun pimpinan parpol’. Demokrasi di Indonesia akan berkembang ke arah yang lebih baik bila pengambilan keputusan dalam partai politik secara desentralisasi. Keterlibatan pemangku kepentingan menjadi penting. Keputusan konsensus didasari oleh argumen-argumen logis atau kebenaran objektif, tanpa ada manipulasi (Harjanto, 2011; McNair, 2017)

## Partai Digital

Gerbaudo (2019; 2018) memberikan definisi partai digital sebagai sebuah partai yang tidak sekadar mengadopsi digitalisasi teknologi komunikasi, melainkan partai yang menjunjung dan menerapkan filosofi digital baik dalam komunikasi internal maupun eksternalnya, yang mengedepankan transparansi, disintermediasi, interaktif, mudah beradaptasi, dan respon cepat. Salah satu karakteristik utama dari partai digital adalah mengutamakan partisipasi baik anggota partai dan publik eksternal (Gerbaudo, 2019; 2018). Dalam praktik partai politik tradisional, partai politik lebih menitikberatkan pemanfaatan media digital sebagai alat kampanye. Sementara, potensi yang dimiliki media digital bisa digunakan untuk menghadirkan kultur politik yang lebih demokratis dalam manajemen partai serta melibatkan publik dalam hal pengambilan keputusan sebuah kebijakan politik.

Pendekatan partai digital meniru praktik media sosial, di mana siapa pun individu bisa menjadi anggota. Publik bisa mengunduh aplikasi atau mengakses ke situs resmi, dan mengikuti proses sign-up tanpa dipungut biaya. Selanjutnya, seperti penggunaan media sosial umumnya, publik yang mendaftar menjadi anggota, baik anggota tetap atau sekadar pemerhati, akan mendapat notifikasi informasi berkala mengenai acara atau kegiatan dari partai tersebut dan bisa memberikan pendapat mereka.

Beberapa partai di Eropa yang masuk dalam kategori partai digital adalah Pirate Parties dari Swedia, the Five Star Movement dari Italia, the France Insoumise dari Perancis, Momentum dari Inggris, dan Podemos dari Spanyol. Masing-masing dari partai tersebut memiliki platform digital untuk menampung anggota mereka. Gerbaudo (2019; 2018) menulis bahwa mayoritas anggota dari partai digital berasal dari kalangan anak muda. Rata-rata rentang umur anggota partai digital berkisar pada umur 18-34 tahun, hanya sebagian kecil berasal dari kalangan di atas 45 tahun. Tidak hanya muda, sebagian besar anggota partai digital juga termasuk kelompok yang teredukasi. Kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi digital menjadi alasan mayoritas anggota partai berasal dari kalangan anak muda.

Gerbaudo (2019; 2018) menegaskan partai digital berusaha hadir dengan struktur organisasi yang ramping. Birokrasi yang biasanya ditemui di partai tradisional, berusaha dihilangkan di partai digital. Rendahnya birokrasi ditandai dengan inklusivitas yang tinggi di partai digital, sehingga anggotanya tidak menyasar pada satu kelompok tertentu. Misalnya di Indonesia, terdapat partai-partai yang berlandaskan agama tertentu dengan tujuan menyasar pemilih dari keyakinan tersebut seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), maupun Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Keunikan lainnya dari partai digital adalah partai ini memiliki visi-misi tertentu, tapi cenderung tidak memiliki landasan ideologi yang konkrit. Gerbaudo (2019; 2018) melihat partai digital bukanlah partai ideologi. Kehadiran partai digital bukan bertujuan untuk mengubah suatu tatanan sosial, melainkan memperjuangkan satu isu atau beberapa isu spesifik yang dirasakan perlu direspon dengan cepat. Lebih lanjut, isu yang diperjuangkan oleh partai digital juga merupakan hasil pengambilan keputusan dari penyerapan aspirasi secara digital

para anggotanya. Keberadaan partai digital dan perjuangannya mengikuti konsensus dari forum diskusi antara politisi partai digital dan publik (anggotanya).

### **Lima Konsep Utama dalam Partai Digital**

Dalam penjabaran partai digital (Gerbaudo 2019; 2018) terdapat lima konsep utama yang menjadi fondasi.

#### **1. *Cloud***

Partai digital berlokasi di cloud atau di internet, sehingga dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Bangunan fisik seperti kantor pusat dan kantor daerah digantikan dengan komunikasi digital melalui medium mobile apps atau platform media sosial milik partai. Agar publik tertarik dan mau bergabung, maka cara pemasaran dari platform ini juga harus meniru logika pemasaran sebuah start-up. Oleh karena itu, Gerbaudo menekankan pentingnya membangun ekosistem platform yang mudah dan nyaman digunakan. Dalam penelitian yang dilakukan Gerbaudo, beberapa partai politik di Barat sudah bertransformasi menjadi partai digital. Masing-masing partai memiliki platformnya sendiri. Di antaranya adalah Partai Podemos di Spanyol dengan platform yang dinamakan Participa, di Inggris untuk Partai Buruh – Momentum memiliki platform yang dinamakan MyMomentum, Partai Insoumise di Perancis dengan Nation Builder, Pirate Party dari Jerman dengan platform Liquid Feedback dan lain-lain. Walau platform di atas berbeda nama, tapi semuanya memiliki kesamaan fitur, yakni platform partai digital wajib memiliki fitur komunikasi dua arah. Fitur tersebut untuk mengundang para anggota dapat berdiskusi secara daring. Topik untuk diskusi tidak dibatasi dan bisa beragam sekali, mulai dari komentar pemberitaan teranyar, isu-isu panas, kebijakan yang dianggap kontroversi, maupun debat untuk menentukan siapa yang layak diusung jadi kandidat presiden. Fitur lainnya dalam partai digital berupa fitur untuk menampung donasi atau sumbangan finansial para pendukung, fitur pendidikan atau pelatihan politik, maupun fitur untuk materi kampanye.

#### **2. *Partisipasionisme***

Kehadiran partai digital lahir karena rendahnya kepercayaan dari sistem representasi dalam politik saat ini. Manakala representasi tidak representatif, maka partisipasi langsung menjadi solusi alternatif. Gerbaudo (2019, hlm. 81) menggarisbawahi politik dapat disebut ideal bila rakyat berpartisipasi. Partai digital di Barat menjadikan partisipasi sebagai fondasi partai mereka. Partai Five Star Movement menilai partisipasi jauh lebih tinggi derajatnya daripada representasi. Sementara, Partai Insoumise menekankan pada inklusivitas rakyat dalam berpolitik. Selain itu, Partai Podemos menilai partisipasi massif publik dimungkinkan dengan teknologi saat ini. Partisipasi dalam partai digital bisa diwujudkan dengan melibatkan publik untuk setiap keputusan politik yang diambil. Suara rakyat bukan suara individu yang menjadi wakil rakyat, melainkan murni suara rakyat. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil tidak lepas dari pengawasan publik (public scrutiny). Tidak hanya itu, partisipasi di sini tidak terbatas di eksternal saja, melainkan juga internal partai itu sendiri. Pengambilan keputusan di partai tidak serta merta top-down, tapi dilakukan secara horizontal.

3. *Hyperleader*

Gerbaudo mengasumsikan partai digital seperti start-up. Di balik kesuksesan start-up tidak lepas dari atau tokoh sentralnya. Di Facebook terdapat Mark Zuckerberg, Alibaba memiliki Jack Ma, dan di Tesla terdapat Elon Musk. Namun di partai digital, perlu sosok politisi yang tidak sekadar menjadi tokoh sentral, melainkan juga menjelma sebagai hyperleader. Gerbaudo menjelaskan hyperleader sebagai sosok pemimpin yang menjadi simbol utama dan wajah dari partai, bahkan sosok ini merupakan perwujudan dari partai tersebut. Lebih lanjut, Gerbaudo (2019, hlm. 147) menulis “*leaderless organisation is meaningless as talking of a headless mammal or of a wingless bird*”. Pemilihan hyperleader ini tidak bisa sembarangan. Gerbaudo mengemukakan beberapa syarat yang harus dimiliki. Pertama, memiliki karisma dan jiwa kepemimpinan kuat yang dapat menjadi representasi partai. Kedua, lazimnya amanah menjadi tokoh sentral diberikan kepada pendiri (founder). Sebab, tanpa si pendiri, maka partai digital tidak akan terbentuk. Ketiga, menjadi sosok yang bisa menjamin kelangsungan partai. Keempat, politisi yang memiliki persona selebriti.

4. *Superbase*

Dalam partai digital, Gerbaudo memakai istilah superbase, istilah yang dipinjamnya dari bidang kimia yang berarti bahan dasar dalam senyawa super basa (super-basic compound). Menurut dia, keberadaan partai politik akan hilang eksistensinya bila tidak ada pendukung. Ketika seorang individu bergabung menjadi pendukung (member) di partai digital, Gerbaudo melihat ikatan emosional yang terjadi tidaklah sekuat ketika seseorang bergabung dengan partai tradisional. Salah satu alasannya adalah terlalu mudahnya seseorang bisa meregistrasikan diri menjadi pendukung.

5. *Plebiscitarianism 2.0*

Asumsi yang muncul seiring lahirnya partai digital adalah praktik dari demokrasi langsung bisa terjadi di mana aspirasi dari publik betul-betul didengar dan menjadi landasan partai untuk diperjuangkan ke tahap kebijakan. Hal ini dipertajam juga dengan fitur komunikasi dua arah secara daring di platform partai digital di mana suara masing-masing individu bisa tertampung dan menyoroti isu mana yang layak direspon cepat. Artinya, terdapat proses deliberasi untuk mencapai suatu konsensus. Namun, menurut Gerbaudo, praktik yang terjadi adalah demokrasi plebisit (*Plebiscitary Democracy*) di mana publik yang tergabung di partai digital diberikan sebuah isu kemudian diminta untuk menjawab dengan jawaban setuju atau tidak (*yes or no answer*). Gerbaudo menggarisbawahi energi untuk pelaksanaan demokrasi langsung dikesampingkan, karena mengejar ratifikasi maupun pembenaran dalam menjalankan aktivitas politik partai digital. Alhasil, dalam demokrasi plebisit, gaya komunikasi politik yang terjadi cenderung dari atas ke bawah (*top down*). Praktik demokrasi jenis ini mirip dengan referendum.



## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena fenomena yang dibahas berasal dari sebuah realitas sosial. Peneliti berusaha untuk mencari informasi mendalam-dalamnya dan mencari jawaban atas pertanyaan penelitian yang sudah dijabarkan. Jenis kualitatif menjadi penting karena sangat sulit untuk mengkuantifikasikan perilaku maupun strategi yang diambil oleh manusia (Haryono, 2020)

Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah studi kasus karena berfokus pada kejadian kontemporer dan mampu menjawab pertanyaan yang bersifat *how* dan *why* sesuai konteks dunia saat ini (Yin, 2018). Peneliti menaruh perhatian pada kasus tunggal yakni di Partai Solidaritas Indonesia, guna melakukan eksplorasi mendalam dan memberikan pembahasan holistik. Dalam beberapa penelitian, studi kasus dilakukan untuk melihat beberapa kasus. Namun, Yin (2018) menegaskan bahwa telaah pada kasus tunggal bisa dilakukan. Selain itu, hasil maupun pembahasan tetap valid karena mampu memberikan jawaban atau pemahaman umum dari proposisi teori atau konsep (Yin, 2018, hlm. 52).

Pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi lapangan. Peneliti akan melakukan wawancara kepada Direktur Bidang Digital PSI Sigit Widodo yang terlibat langsung dalam penciptaan serta pengembangan platform Solidaritas PSI, Anggota DPRD DKI Bandung PSI Yoel Yosaphat, serta masyarakat umum yang menggunakan aplikasi tersebut. Selain itu, observasi dilakukan dalam dua bagian. Pertama, observasi proses kerja dari platform PSI. Kedua, observasi proses *back-end* dari aplikasi tersebut. Sementara, data sekunder didapat dari studi pustaka dan penelusuran data daring yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini.

Teknik analisis data dalam penelitian ini akan mengikuti pandangan Yin (2018). Menurut Yin, terdapat empat teknik yang lazim diterapkan dalam penelitian studi kasus yaitu *relying on theoretical propositions*, *working data from the ground up*, *developing a case description*, dan *examining plausible rival explanations*. Mengacu pada objek penelitian yang merupakan kasus tunggal, maka data-data yang sudah dikumpulkan akan dianalisis mengacu pada *theoretical propositions* di mana temuan penelitian dapat mendukung atau mengkritik teori maupun konsep yang dipakai dalam kajian ini (Yin, 2018, hlm. 73). Upaya untuk menjaga validitas, maka peneliti menerapkan triangulasi data. Yin (2018, hlm. 173) menjelaskan penelitian studi kasus memerlukan pengumpulan multisumber yang saling menguatkan satu temuan. Data primer dan data sekunder dibandingkan untuk meningkatkan keakuratan temuan dari penelitian ini.

## Hasil Penemuan dan Diskusi

PSI merupakan partai pertama di Indonesia yang memiliki platform digital yang digunakan dalam komunikasi politiknya. Dalam bagian ini, akan dijelaskan alasan menghadirkan Aplikasi Solidaritas, kemudian akan dijabarkan pula pemanfaatan dari aplikasi tersebut. Tidak hanya itu, dielaborasi pula posisi PSI sebagai partai digital dalam kerangka konsep Paulo Gerbaudo.

### Lahir dari Janji Kampanye

Gagasan untuk menghadirkan Aplikasi Solidaritas lahir ketika Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendapat kepastian tidak lolos parliamentary threshold pada Pemilu 2019. Ide untuk menghadirkan platform digital ini berasal dari sembilan pengurus inti PSI (Grace Natalie, Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, Nova Rini, Sumardy Ma, Suci Mayang, Lila Zuhara, Satia Chandra Wiguna, dan Danik Eka) beserta dua pembina PSI (Jeffrie Geovanie dan Sunny Tanuwijaya).

*Ketika kita (PSI) tidak berhasil masuk ke parlemen pusat, bagaimana pun kita pernah janji, dan kita mau tepati janji tersebut. Ini murni gagasan yang muncul setelah kita kalah pemilu (Sigit Widodo, dalam wawancara, 2022).*

*Aplikasi ini itikad baik nih dari partai, bikin aplikasi upaya masyarakat, eh kalo mau curhat bisa lewat aplikasi ini. Eh kalau mau lihat agenda, bisa liat dari aplikasi ini. Saya lihat ini cuma satu-satunya sih, di partai lain nggak ada controlling seperti ini (Yoel Yosaphat, dalam wawancara, 2022).*

PSI melihat minimnya keterlibatan rakyat dalam politik. Salah satu keterlibatan yang paling jelas adalah menggunakan hak pilih saat Pemilu di mana kegiatan tersebut hanya dilakukan lima tahun sekali. Setelah hak pilih digunakan, ada jurang yang memisahkan antara rakyat dan anggota dewan yang terpilih. Selama ini, hanya kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, maupun lembaga tertentu yang mengawasi kerja DPR terpilih. Misalnya, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) yang rutin merilis rapor untuk kinerja DPR (Formappi, 2021).

Selain itu, dalam upaya penyerapan aspirasi, PSI melihat peluang di masa mendatang di mana mayoritas penduduk Indonesia dikuasai oleh Generasi Milenial dan Gen-Z (Badan Pusat Statistik, 2020). Kedua generasi itu memiliki karakteristik yang beririsan yakni, dalam adaptasi serta penggunaan teknologi. Oleh karena itu, PSI melihat perlunya membuat platform digital yang diberi nama Aplikasi Solidaritas. Aplikasi tersebut bertujuan untuk mendayakan masyarakat umum dalam praktik berpolitik.

Aplikasi Solidaritas yang sudah berfungsi sejak 2020 ini digunakan untuk menjembatani masyarakat umum dengan anggota dewan terpilih PSI, yang keseluruhannya merupakan anggota DPRD. Saat ini, PSI memiliki total 72 anggota DPRD yang tersebar di enam provinsi (Bali, Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara), dan 43 Kabupaten/Kota antara lain adalah Kab. Alor, Kab. Asmat, Kab. Biak Numfor, Kab. Ende, Kab. Halmahera Selatan, dan sebagainya. Di tingkat Provinsi, PSI memiliki 13 anggota legislatif. Sementara, di Kab/Kota, terdapat 59 anggota legislatif PSI.

Silvanus Alvin:

The Evolution of Political Party in Indonesia: PSI Towards a Digital Party

Evolusi Partai Politik di Indonesia: Studi Kasus PSI Menuju Partai Digital

Per 4 April 2022, jumlah pengguna dari Aplikasi Solidaritas berjumlah 1.601, yang terbagi dalam tiga tipe, yakni admin (satu pengguna), legislator daerah sebanyak 72 pengguna, dan 1.528 pengguna berasal dari kalangan umum. Secara komposisi jenis kelamin, mayoritas pengguna adalah laki-laki dengan total 1.073 pengguna dan 455 pengguna perempuan.



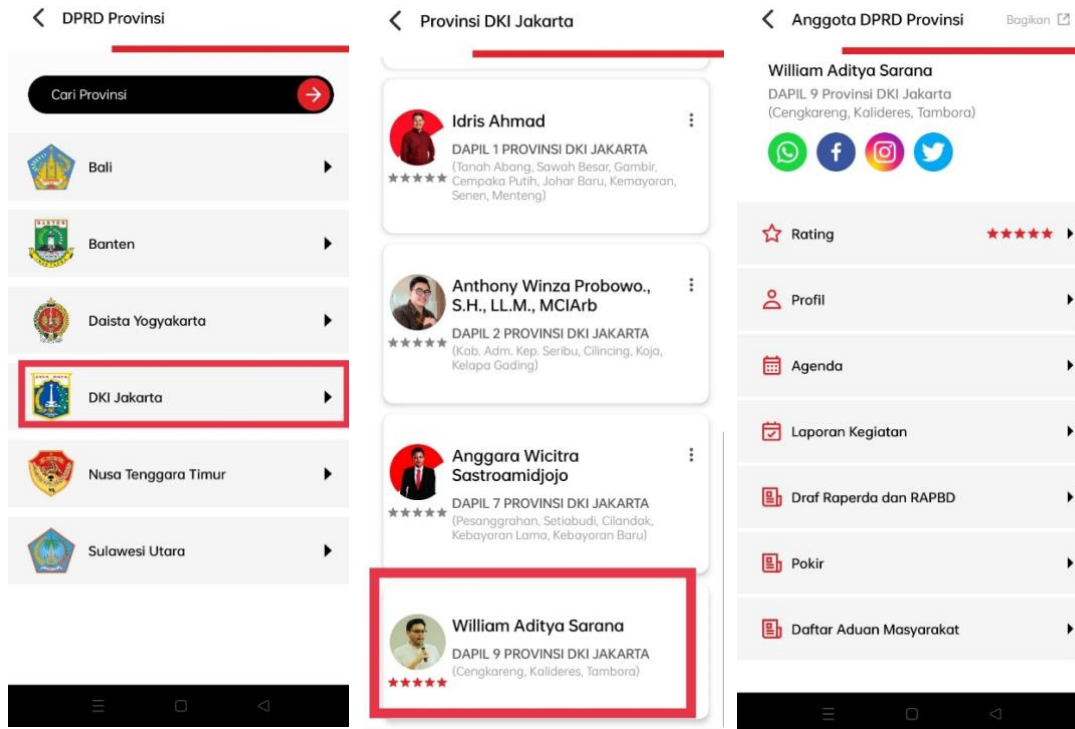
**Gambar 1:** Tampilan *Home Page* Aplikasi Solidaritas (22 Januari 2022)

Terkait dengan fitur, Aplikasi Solidaritas ini dikreasikan menyerupai fitur-fitur yang terdapat di aplikasi seperti Gojek, Grab, maupun aplikasi sejenis. Misalnya, pemberian penilaian atau rating. Jika dalam Gojek atau Grab, rating diberikan pada supir selaku pemberi jasa, maka dalam Aplikasi Solidaritas anggota dewan terpilih yang jadi objek untuk diberi *rating*. Masyarakat umum dapat mengunduh Aplikasi Solidaritas dari ponsel pintar melalui *Play Store* maupun melalui *Google Play*.

Gerbaudo (2019; 2018) menjelaskan bahwa partai yang dikategorikan partai digital memiliki ciri meniru sistem kerja dan logika dari perusahaan teknologi (Facebook, Uber, AirBnB, dll) yang terbuka bebas untuk diakses semua orang (free sign-up) dan berusaha menghilangkan hambatan-hambatan individu berpartisipasi aktif menggunakan hak politiknya.

Terdapat tujuh fitur utama dalam Aplikasi Solidaritas (Gambar 2). Fitur-fitur tersebut yakni, Rating (untuk memberikan penilaian atas kinerja anggota dewan), Profil (biografi singkat untuk mengetahui anggota dewan berupa latar belakang pendidikan dan misi politik yang diperjuangkan), Agenda (daftar dari kegiatan anggota dewan sehari-hari), Laporan Kegiatan (laporan dari aktivitas yang sudah dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi pada masyarakat), Draf Raperda dan RAPBD (masyarakat bisa memberikan usulan maupun kritik dari Raperda dan RAPBD), Pokir (fitur untuk penyerapan aspirasi

masyarakat), dan Daftar Aduan Masyarakat (fitur untuk menampung aduan masyarakat).



**Gambar 2:** Tampilan Anggota DPRD PSI per Daerah dan Fitur-fiturnya

PSI tidak membatasi atau mewajibkan masyarakat harus *sign-up* lebih dulu baru bisa menggunakan fitur-fitur. Hanya ada sedikit perbedaan bagi yang *sign-up* dan tidak, yaitu dalam fitur 'Ikuti' atau *follow* anggota dewan. Bagi yang belum mendaftar dan klik tombol 'Ikuti' maka akan diarahkan ke halaman *sign-up*. Di halaman anggota dewan tertentu, dicantumkan pula media sosial dan nomor Whatsapp anggota.

### **Pemanfaatan Aplikasi Solidaritas: Pengaduan dan Pengawasan Digital, serta Kepentingan Politik**

Mekanisme yang ada saat ini, anggota DPR dapat mendekatkan diri dengan masyarakat melalui Rumah Aspirasi (Apriliansyah, 2020). Tiap anggota dewan dianggarkan Rp 1,78 miliar untuk membangun dan memperkerjakan tenaga ahli bagi Rumah Aspirasinya. Dasar hukum dari Rumah Aspirasi tertuang dalam Tata Tertib DPR (Apriliansyah, 2020). Dalam tata tertib tersebut, tepatnya Pasal 1 ayat 18 mengatur definisi Rumah Aspirasi sebagai “ruang yang menjadi penghubung untuk menyerap, menampung, dan menyalurkan aspirasi rakyat pada wakilnya yang duduk di parlemen yang kemudian diharapkan untuk segera ditindaklanjuti” (Apriliansyah, 2020, hlm. 25).

Silvanus Alvin:

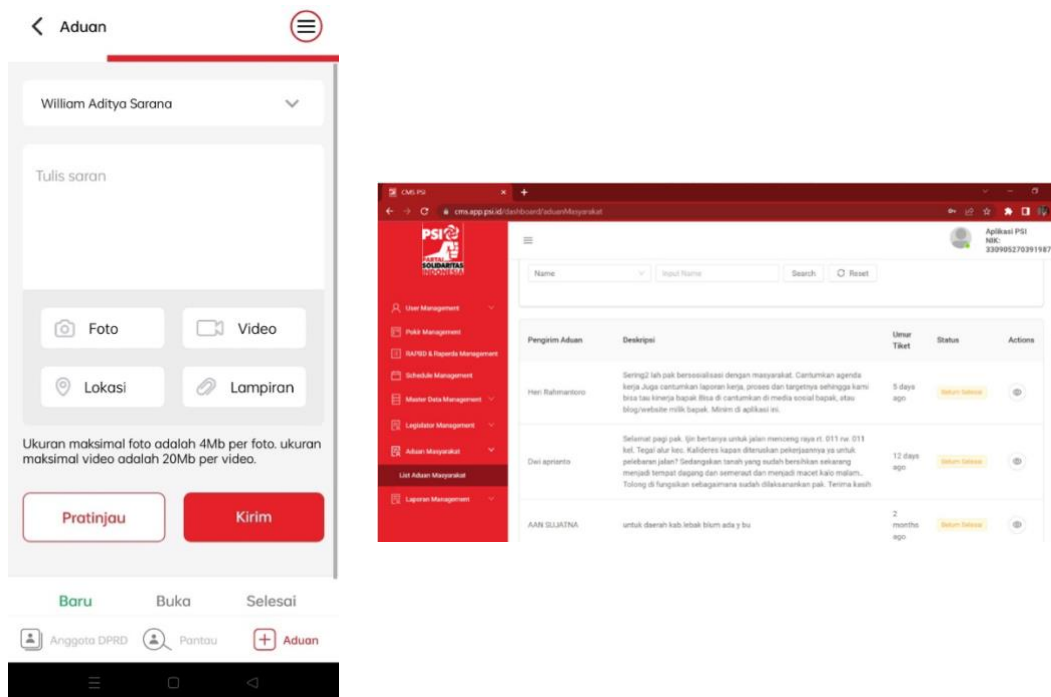
The Evolution of Political Party in Indonesia: PSI Towards a Digital Party

Evolusi Partai Politik di Indonesia: Studi Kasus PSI Menuju Partai Digital

Masyarakat yang datang kemudian diterima oleh Tenaga Ahli DPR dan aduan yang disampaikan lantas diteruskan ke anggota dewan. Praktik seperti ini, tentu birokratis, memakan waktu, serta terbatas secara ruang dan waktu. Selain itu, Rumah Aspirasi cenderung membuat jarak bahwa masyarakat tidak bisa langsung berkomunikasi dengan anggota dewan yang dipilihnya melainkan hanya dapat bertemu dengan perantara. Bila praktik serupa dijalankan secara digital maka dari bisa menghemat anggaran karena tidak memerlukan bangunan fisik, kemudian aspirasi maupun aduan bisa langsung masuk ke anggota dewan tanpa perlu perantara (*disintermediation practice*).

Celah inilah yang dilihat PSI dalam menghadirkan Aplikasi Solidaritas. Berdasarkan fitur-fitur yang sudah dijabarkan di atas, Aplikasi Solidaritas ini memiliki dua tujuan utama, yaitu pengaduan dan pengawasan dari masyarakat terhadap anggota legislatif PSI. Di era digital, masyarakat sepatutnya bisa dimudahkan untuk mengawasi politisi yang dipilih dan dapat dengan mudah berkomunikasi, baik untuk menyampaikan aduan, kritik maupun saran. Artinya, masyarakat bisa mengakses di mana saja dan kapan saja.

Ketika ada hal yang mau disampaikan ke anggota dewan, masyarakat bisa langsung pilih anggota dewan sesuai daerah pemilihan (dapil), kemudian klik tombol 'Aduan'. Selanjutnya, masyarakat diarahkan ke dalam sebuah halaman dan diminta mengisi aduan yang mau disampaikan (Gambar 3). Fitur 'Aduan' ini memakai *ticketing system*. Ketika aduan dikirimkan, maka masyarakat akan mendapat nomor tiket. Setelah itu, masyarakat tinggal menunggu aduan direspon atau anggota dewan menghubungi untuk mendalami aduan tersebut.



**Gambar 3:** Tampilan Aduan Aplikasi Solidaritas (Kiri) dan Tampilan *Back-end* (Kanan)

Dari sisi pengawasan, masyarakat dapat melihat apakah aduan sudah dibaca atau ditindaklanjuti oleh anggota dewan. Bagi anggota dewan yang menerima aduan juga memiliki prosedur dalam menindaklanjuti. Bila dalam waktu satu minggu tidak diproses, maka akan diingatkan oleh Direktorat Digital PSI. Tingkat ekstrimnya, bila aduan masyarakat lebih dari satu bulan tidak direspon maka akan mendapat teguran dari pimpinan partai, yang diwakilkan oleh Direktorat Pembinaan Anggota Legislatif PSI.

*Artinya kita punya wakil rakyat yang bisa kita awasi, kemudian kita bisa berikan aduan, dan bisa menjadi solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Masyarakat jadi bisa memberikan aduan-aduan, input, dan bisa memberikan nilai kepada anggota legislative, rating, seperti di Gojek, bisa kasih bintang 1 sampai bintang 5. Di situ bisa kita lihat apakah anggota legislative kinerjanya baik atau tidak langsung dari masyarakat (Sigit Widodo, dalam wawancara, 2022).*

Melalui cara kerja seperti ini, PSI berupaya menjadi contoh praktik anggota dewan yang ideal. Aduan yang disampaikan dan diselesaikan maupun tidak memiliki rekam jejak digital. Begitu pula rating yang diberikan langsung oleh masyarakat, bukan sekadar penilaian kosong melainkan dapat menjadi modal untuk Pemilu berikutnya. Dengan demikian, masyarakat memiliki informasi, pengetahuan, dan pemahaman anggota dewan mana yang layak dipilih dan mana yang tidak pantas dipilih kembali.

*Jadi masyarakat bisa lihat oh anggota ini kerja dengan benar, sehari-hari memang untuk masyarakat, tidak bolos, tidak tidur di sidang, maka ketika lima tahun bisa dipilih lagi. Jadi ada track recordnya (Sigit Widodo, dalam wawancara, 2022).*

*Partai bisa ngelihat kamu ikut rapat. Berapa persen (kehadiran)? Kamu buktinya mana? Daftar hadirnya apa? Terus laporan fotonya di man? Itu controlling sistem di dalam yah bahwa kita beneran ikutan rapat, nggak cuman titip absen, kayak gitu-gitu (Yoel Yosaphat, dalam wawancara, 2022).*

Lebih lanjut, aduan yang disampaikan tidak wajib melalui aplikasi, melainkan juga bisa via pesan atau telepon Whatsapp langsung ke anggota dewan. Bagi masyarakat yang merasa memiliki urgensi khusus dalam aduannya, bisa memilih anggota dewan yang ingin dimintai tolong dan klik tombol logo Whatsapp. Selanjutnya, masyarakat akan diarahkan langsung ke halaman chat anggota dewan tersebut. Dari sisi anggota dewan, mereka seakan merangkap pekerjaan sebagai call center di luar dari tugas sebagai legislatif.

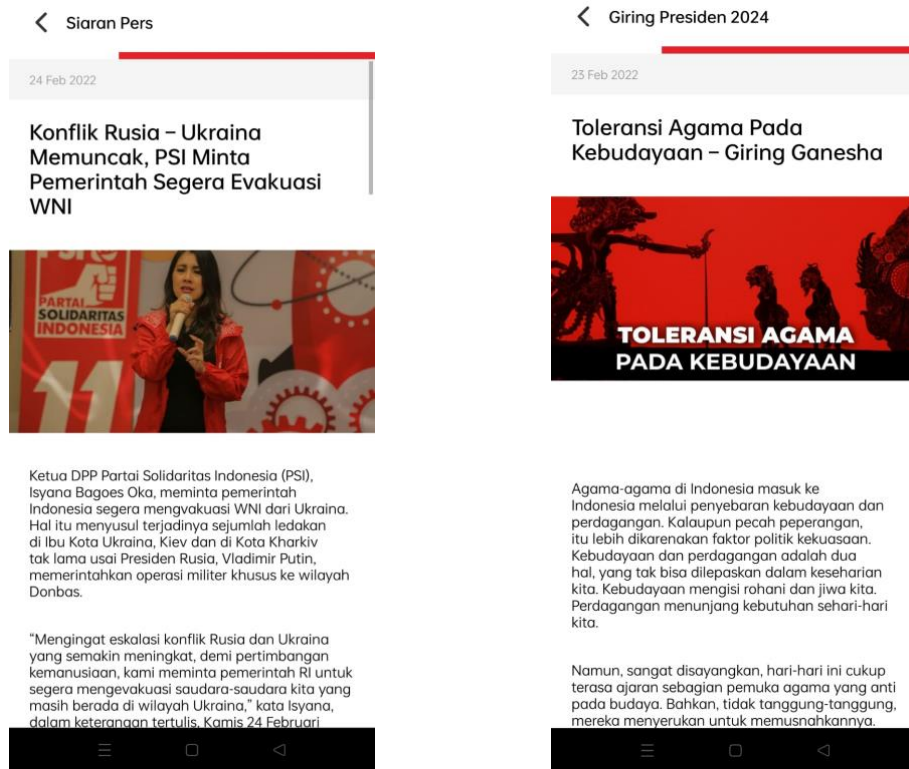
*Mereka tuh lebih ingin respon instan yang di mana langsung sama orang ngerjain... itu langsung lewat personal gitu sih. Itu yang seringnya terjadi di masyarakat. Meskipun ada aplikasi, kendalanya adalah ya mereka memilih untuk lewat yang lebih gampang, lebih praktis gitu...kita tuh kayak call center lah seperti itu (Yoel Yosaphat, dalam wawancara, 2022).*

Selain pengaduan dan pengawasan, Aplikasi Solidaritas ini juga memiliki fitur pendukung, yakni menampilkan diseminasi informasi seputar PSI. Informasi disajikan dalam bentuk visual foto dan teks. Tidak diketahui ada informasi yang disajikan dalam bentuk video. Terdapat dua tipe informasi yang disajikan yaitu siaran pers dan opini atau sikap PSI (Gambar 4).

Silvanus Alvin:

The Evolution of Political Party in Indonesia: PSI Towards a Digital Party

Evolusi Partai Politik di Indonesia: Studi Kasus PSI Menuju Partai Digital



**Gambar 4:** Dua Tipe Diseminasi Informasi Aplikasi Solidaritas

Dari fitur ini, masyarakat bisa mengetahui sikap dari Pimpinan maupun anggota legislatif PSI. Berita-berita ini ditampilkan di halaman utama (home page) dan disajikan dalam bentuk newsfeed yang menyerupai penyajian di portal berita daring. Tidak dapat dipungkiri, para pengguna yang menggunakan Aplikasi Solidaritas ini sudah terekam datanya, sadar atau tidak sadar. Di era saat ini, politik erat kaitannya dengan pemanfaatan Big Data (Alvin, 2022). Big Data bisa didapat oleh partai politik dengan cara dibeli maupun secara gratis. Sehubungan dengan Aplikasi Solidaritas, pengguna memberikan data mereka secara cuma-cuma atau free data disclosed by individuals (Alvin, 2022, hlm. 47).

*PSI tidak memungkiri bahwa data-data itu direkam dan disimpan dengan baik. Tidak hanya itu, data pengguna kemungkinan besar akan dimanfaatkan. Namun, pemanfaatan masih mempertimbangkan batas etika dan berusaha mematuhi UU ITE. Sampai sekarang belum, tapi kita pasti manfaatin data itu, bego saja kalau enggak. Cuma masalahnya sejauh mana kita manfaatin sehingga tidak melanggar kode etik, tidak melanggar penggunaan data pribadi. Itu masih kita pikirkan. Tapi pemanfaatannya pasti (Sigit Widodo, dalam wawancara, 2022).*

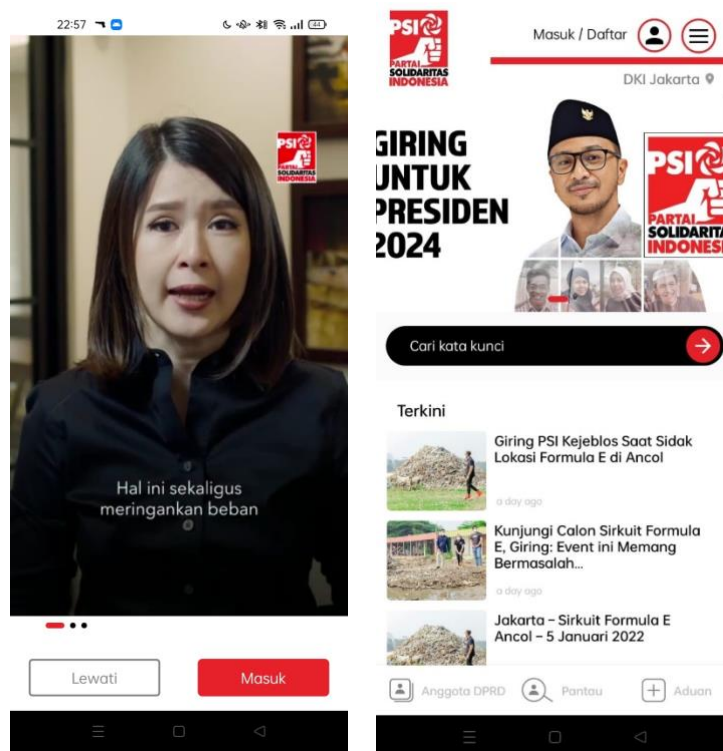
### Menuju Partai Digital

Menurut Gerbaudo (2019; 2018) terdapat lima kriteria utama partai digital yaitu partai berbasis *Cloud*, *Partisipasionisme*, *Hyperleader*, *Superbase*, dan *Plebiscitarianism 2.0*. Pembahasan mengenai hal ini akan terbagi menjadi dua poin besar, yaitu yang sudah dipenuhi oleh PSI dan belum dipenuhi PSI.



Terdapat tiga kriteria yang sudah dipenuhi PSI. Pertama, partai yang berbasis cloud. Aplikasi Solidaritasnya dapat termasuk memenuhi kriteria *cloud*, karena masyarakat sudah dapat dengan mudah mengakses melalui sambungan internet serta perangkat ponsel pintar. Aplikasi juga didukung tujuh fitur utama yang memangkas birokrasi.

Kedua, terkait *Hyperleader*, wajah yang ditampilkan ada dua tokoh yaitu Grace Natalie (Ketua Umum PSI 2014-2019) dan Giring Ganesha (Ketua Umum PSI 2019-2024). Ketika membuka Aplikasi Solidaritas pertama kali, maka pengguna akan mendapati video pendek sebagai pengantar yang diisi oleh Grace Natalie. Selanjutnya, di halaman utama (home page) maka didapati muka Giring selaku ketua umum saat ini.



**Gambar 5:** Dua Wajah *Hyperleader* PSI: Grace Natalie (kiri) & Giring Ganesha (kanan)

Baik Grace maupun Giring memenuhi syarat menjadi hyperleader (Gerbaudo, 2019; 2018)), walau masing-masing memiliki keunggulan signifikan di sisi tertentu. Uzunoglu (2019, hlm. 549) menggarisbawahi “*Hyper-leaders are social media celebrities and political leaders at the same time. Or better, they are political leaders because they are social media celebrities.*” Grace merupakan pendiri (founder) dari PSI dan Giring memiliki modal popularitas karena berprofesi sebagai selebriti sebelum masuk politik. Sedikit berbeda dengan konsep hyperleader yang dicetuskan Gerbaudo (2019; 2018), di mana hanya satu politisi yang dijadikan figur sentral. Terdapat dua alasan mengapa PSI memiliki dua hyperleader. Pertama, Aplikasi Solidaritas ini merupakan ide dan janji politik



Silvanus Alvin:

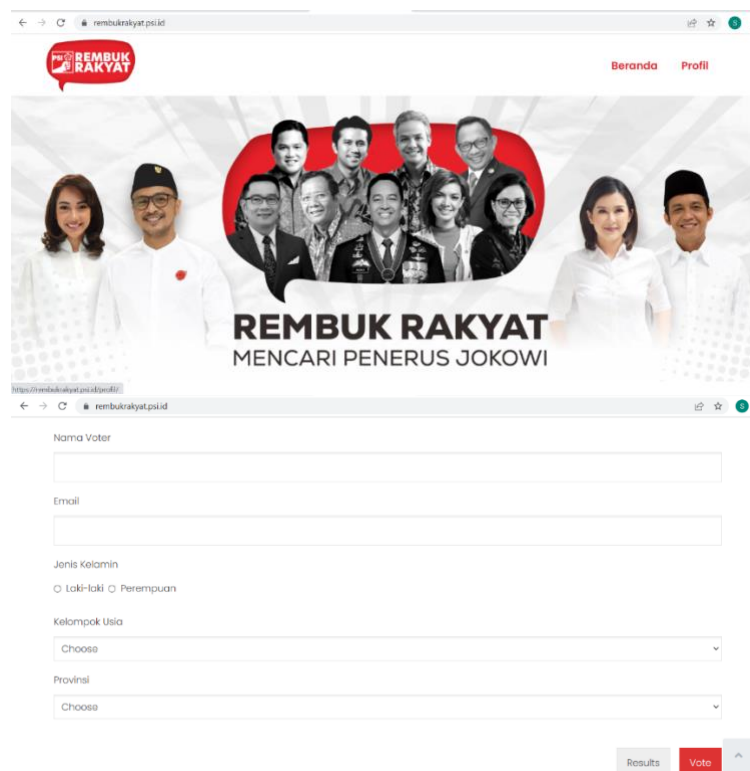
The Evolution of Political Party in Indonesia: PSI Towards a Digital Party

Evolusi Partai Politik di Indonesia: Studi Kasus PSI Menuju Partai Digital

yang dicetuskan oleh Grace Natalie. Kedua, meredam perpecahan internal partai pasca-pergantian ketua umum.

*Kita tidak mempersoalkan siapa yang muncul, Grace dulu, atau Giring dulu, tapi Aplikasi Solidaritas ini janjinya Grace... Ada kekhawatiran atau pandangan di masyarakat bahwa kepemimpinan lama (Grace Natalie-Raja Juli Antoni) tidak berhasil kemudian digantikan. Padahal tidak begitu... Ada pertanyaan serupa di kader, jadi sekarang untuk meredam itu kita tampilkan wajah-wajah ini... (Sigit Widodo, dalam wawancara, 2022).*

Ketiga, kriteria Plebiscitarianism 2.0. Praktik demokrasi plebisit belum tampak di Aplikasi Solidaritas, karena fitur utama seperti Raperda dan RAPBD masih belum dilakukan. Masyarakat hanya sebatas bisa mengadu kemudian memberi rating dari tindaklanjut aduan tersebut. Meski demikian, PSI memiliki sebuah situs beralamat <https://rembukrakyat.psi.id/> (Gambar 6), yang dimanfaatkan untuk mengajak partisipasi masyarakat umum dalam memilih capres dari sembilan tokoh yang ditampilkan. Situs tersebut tidak terintegrasi dengan Aplikasi Solidaritas.

The image is a screenshot of a web browser displaying the website 'rembukrakyat.psi.id'. The browser's address bar shows the URL. The website has a red header with the 'REMBUK RAKYAT' logo and navigation links for 'Beranda' and 'Profil'. The main content area features a large banner with a group of nine Indonesian political figures, including Jokowi, and the text 'REMBUK RAKYAT' and 'MENCARI PENERUS JOKOWI'. Below the banner is a voting form with fields for 'Nama Voter', 'Email', 'Jenis Kelamin' (with radio buttons for 'Laki-laki' and 'Perempuan'), 'Kelompok Usia' (with a 'Choose' dropdown), and 'Provinsi' (with a 'Choose' dropdown). At the bottom right of the form are buttons for 'Results' and 'Vote'.

**Gambar 6:** Voting Kandidat Capres di RembukRakyat.psi.id

Mekanisme pemilihan kandidat capres di situs tersebut, kental dengan praktik demokrasi plebisit (Gerbaudo, 2019; 2018), di mana Pimpinan PSI memberikan pilihan terbatas sebanyak sembilan tokoh untuk dipilih publik. Dalam tampilan gambar di atas, terlihat tidak ada fitur bagi publik untuk menominasi tokoh tertentu di luar sembilan orang tersebut. Walau tidak terlihat

adanya tendensi mengarahkan ke tokoh tertentu, praktik ini seakan mencari angka pembenaran publik yang berasal dari jumlah partisipasi. Gerbaudo melihat praktik demokrasi plebisit terjadi di sebuah partai digital.

Selanjutnya, terkait kriteria partai digital yang belum dipenuhi PSI, terdapat dua poin. Pertama, dari segi partisipasi, hal ini masih tergolong rendah karena jumlah pengguna yang sedikit dan minimnya aktivitas. Berkaitan dengan partisipasi, pihak yang menggunakan Aplikasi Solidaritas berasal dari anggota legislatif dan masyarakat umum. Minim aktivitas ini terjadi dari dua sisi. Anggota legislatif tidak mengisi jadwal harian dan laporan kerja, serta tidak mengunduh Raperda dan RAPBD untuk mendapat usulan dari masyarakat. Sementara, dari sisi masyarakat, dari total pengguna, hanya sekitar 10 persen yang menggunakan fitur utama seperti aduan.

Kondisi minimnya partisipasi, berhubungan erat dengan poin kedua yaitu kriteria superbase. Gerbaudo (2019) membagi superbase dalam partai digital dalam dua tipe. Pertama adalah supervolunteer yakni pendukung yang mendaftar kemudian menjadi relawan militan, yang sangat terlibat di tiap kegiatan serta memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan kampanye partai. Para supervolunteer ini merupakan militan digital, dengan inisiatif pribadi mempersonalisasikan pesan kampanye kemudian menyebarluaskan ke jaringan kontak media sosialnya. Personalisasi pesan tersebut ditujukan untuk memperlihatkan sisi orisinal untuk menjaring simpati dari lingkup pertemanan mereka. Bahkan, mereka pun juga aktif mengorganisasikan acara-acara luring. Tipe kedua adalah *lurking supporters*, yakni individu yang sudah meregistrasi diri menjadi anggota partai digital tapi tidak berkontribusi apa-apa. Tipe seperti ini biasanya tetap memantau diskusi daring, terkadang ikut memberikan komentar, atau setidaknya memberi tanda like atau sebatas share konten. Hampir di semua partai, apapun jenisnya, mengalami problematika serupa yakni anggota yang pasif. Meski demikian, dalam ranah partai digital, *lurking supporters* tetap memberikan dampak positif. Hal ini tidak lepas dari logika media sosial di mana jumlah pengikut yang besar memberi kesan kredibel dan terpercaya. Selain itu, ketika tipe pendukung seperti ini share sebuah konten, maka tetap ada dampak impresi yang didulang. *Lurking supporters* juga bisa menjadi micro influencers.

Data per Februari 2022, jumlah pengguna Aplikasi Solidaritas baru 1.540 orang. Angka tersebut jauh lebih rendah dari perolehan suara yang didapat PSI pada Pemilu 2019 sebesar 2,6 juta dukungan. Artinya, pengguna aplikasi masih di bawah 1 persen dan tidak dapat dikategorikan superbase. Elemen partisipasi dan superbase ini begitu esensial karena merupakan ruh dari partai digital. Tanpa dua elemen tersebut, maka sebuah partai ibarat rumah bagus tapi tidak ada penghuninya.

Dapat disimpulkan, PSI belum termasuk ke dalam kategori partai digital, karena belum memenuhi lima kriteria utama Partai Digital menurut Gerbaudo (2019; 2018). Meski demikian, arah pengembangan PSI sudah berada di jalur tepat dalam perjalanan menuju partai digital. PSI saat ini tengah berevolusi dalam upaya membuat terobosan dan meninggalkan praktik komunikasi politik yang *old school*. Upaya untuk berevolusi menuju partai digital ini terhalang beberapa hambatan. Penjelasan akan hambatan akan dielaborasi berikut.

### **Hambatan PSI Menuju Partai Digital**

Terdapat tiga hambatan utama yang menghalangi laju evolusi PSI menuju partai digital. Pertama, hambatan teknis akibat disintegrasi. Selain Aplikasi Solidaritas, PSI memiliki sejumlah situs-situs yang menunjang komunikasi politik secara internal dan eksternal. Di internal, misalnya PSI memiliki situs untuk pelatihan kader secara daring. Di eksternal, ada situs untuk mengumpulkan donasi. Kendala yang dihadapi adalah ketidakmampuan PSI untuk mengintegrasikan situs-situs ke dalam satu aplikasi (super apps).

*Dulu saya ada saran untuk buat single sign-on, okelah aplikasi masih terpisah-pisah tapi 1 user dan 1 pass, itu juga belum jalan. Salah satu aplikasi yang kita punya itu pelatihan kader, itu terpisah. Kalau semua digabung, bisa kita klaim kalau PSI itu sangat digital (Sigit Widodo, dalam wawancara, 2022).*

Hambatan utama kedua adalah masalah keuangan. PSI saat ini sangat bergantung pada dana hasil donasi, baik masyarakat atau pengusaha tertentu. Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung sejak 2020 berdampak pada jumlah donasi yang diterima PSI. Masalah keuangan ini juga berimplikasi pada upaya digitalisasi yang hendak dilakukan PSI. Aplikasi Solidaritas dikembangkan dengan biaya awal Rp 250 juta dan merupakan hasil donasi dari salah seorang donatur yang tidak bisa disebutkan namanya. Tidak hanya itu, kendala finansial yang dihadapi juga mempengaruhi sumber daya manusia di PSI. Proses integrasi maupun pengembangan aplikasi terganggu karena kurangnya tenaga kerja.

*Ini masalah dana dan SDM. Kurangnya SDM juga karena dana. Kalau kita lihat PSI sebelum pemilu 2019, jumlah personil bukan nambah tapi berkurang. Dulu donatur lumayan, sebelum pandemic, 1 tahun bisa bayar staff rutin sekarang lebih banyak kerja yang sebagai volunteer (Sigit Widodo, dalam wawancara, 2022).*

Hambatan ketiga adalah minimnya promosi mengenai Aplikasi Solidaritas. Rendahnya promosi bukan tanpa sengaja, melainkan secara sadar dilakukan. Ketidaksungguhan untuk promosi Aplikasi Solidaritas disebabkan belum optimalnya penggunaan fitur-fitur dalam Aplikasi Solidaritas. Dari tujuh fitur utama, baru fitur Aduan dan Rating yang dioptimalkan. Alhasil masyarakat luas tidak mengetahui adanya aplikasi yang dimiliki PSI ini.

*Dari kita sendiri masih ragu-ragu published. Kita ada bikin rilis (siaran pers) beberapa kali tapi karena masih ada fitur-fitur yang belum secara optimal, kita khawatirnya dari user itu nanti kecewa. Dia merasa ada fitur, bisa kasih masukan ke RAPBD atau Raperda kok belum jalan, sehingga nanti bisa kecewa (Sigit Widodo, dalam wawancara, 2022).*

### **Simpulan**

Perkembangan digital yang semakin massif mau tidak mau harus direspon dengan baik oleh partai politik di Indonesia. PSI sebagai pionir tengah berupaya untuk berevolusi menjadi partai digital. Evolusi merupakan proses dan memerlukan waktu. Usaha berevolusi itu diwujudkan dalam bentuk menghadirkan Aplikasi Solidaritas. Aplikasi tersebut lahir dari janji politik pimpinan pusat PSI (dewan pembina dan pengurus harian) pasca-pemilu 2019. PSI memanfaatkan

Aplikasi Solidaritas sebagai wadah digital untuk menampung aduan masyarakat, memberi daya bagi masyarakat untuk mengawasi para anggota dewan terpilih, serta medium untuk memangkas birokrasi. Kapan pun dan di mana pun selama masyarakat memiliki akses internet dan sudah mengunduh aplikasi ini, maka bisa langsung menggunakan fitur-fitur yang ada.

Dalam konsep partai digital yang dicetuskan Paulo Gerbaudo, PSI belum termasuk sebagai partai digital. Sejauh ini, PSI baru memenuhi kriteria partai berbasis *cloud* dan memiliki *hyperleader*. Hal ini tidak lepas dari tiga hambatan yang mengganggu evolusi PSI menuju partai digital, yaitu aset digital yang tidak terintegrasi menjadi super apps, masalah finansial, dan minimnya promosi untuk pengenalan Aplikasi Solidaritas terhadap public. Dari ketiga hambatan itu, terdapat masalah keuangan sebagai sumber gangguan utama bagi PSI.

Berangkat dari penelitian ini, penulis menyarankan beberapa hal kepada PSI yang sedang dalam perjalanan menuju partai digital. Pertama, masalah finansial bisa diatasi sebagian dengan mengalakkan grassroot melalui program volunteer. Agar masyarakat luas mau menjadi relawan, maka diperlukan sebuah added value sebagai timbal balik. Gerakan relawan ini bukan hal baru di kancah perpolitikan Indonesia (Arianto, 2016; Sucahyo, 2019). Kedua, perlu memperhatikan user interface dan user experience (UI-UX) dari Aplikasi Solidaritas agar tetap mengikuti tren sesuai generasi. PSI disarankan melakukan focus group discussion (FGD) serta melakukan survei mengenai tampilan aplikasi seperti apa yang disukai anak muda (Generasi Milenial dan Gen-Z). Ketiga, PSI perlu menginstruksikan anggota legislatif terpilih untuk memberdayakan Aplikasi Digital. Oleh karena itu, diperlukan kombinasi dari pola pikir dan tindakan yang berorientasi pada digital. Jangan sampai sarana digital sudah siap tapi tidak bisa dioperasikan dengan baik oleh anggota legislatif. Bila anggota dewan tidak mampu, agak sulit rasanya membuat publik mau memanfaatkan aplikasi tersebut.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Multimedia Nusantara yang sudah membiayai penelitian ini.

### Daftar Pustaka

- Abdulsalam, H. (2018). *Hai Bro-Sis PSI, Ada yang Bisa Dipelajari dari Perancis dan India*. Tirto.Id. <https://tirto.id/hai-bro-sis-psi-ada-yang-bisa-dipelajari-dari-perancis-dan-india-cJpx>
- Alam, S. (2019). STRATEGY OF POLITICAL PARTY CAMPAIGN ON SOCIAL MEDIA (Case Study of Partai Soldaritas Indonesia in Criticizing the Indonesian Parliament Through YouTube). *ICCD*, 2(1), 494–499. <https://doi.org/10.33068/iccd.Vol2.Iss1.196>
- Alam, S. (2021). Penggunaan Media Sosial Sebagai Alat Komunikasi Politik. *Avant Garde*, 9(1), 67. <https://doi.org/10.36080/ag.v9i1.1257>
- Alfiyani, N. (2018). MEDIA SOSIAL SEBAGAI STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK. *Potret Pemikiran*, 22(1). <https://doi.org/10.30984/pp.v22i1.762>

- Alvin, S. (2019). Manajemen Citra Politik Prabowo Subianto Dan Sandiaga Uno Melalui Akun @Prabowo Dan @Sandiuno. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 13(2). <https://doi.org/10.24090/komunika.v13i2.2538>
- Alvin, S. (2022). *Komunikasi Politik di Era Digital: dari Big Data, Influencer Relations & Kekuatan Selebriti, hingga Politik Tawa* (1st ed., Vol. 1). Deepublish. <https://penerbitbukudeepublish.com/shop/buku-komunikasi-politik/>
- Anshari, F. (2013). Komunikasi Politik di Era Media Sosial. *Jurnal Komunikasi*, 8(1), 91–102.
- Apriliansyah, M. (2020). EFEKTIVITAS PELAYANAN RUMAH ASPIRASI ANGGOTA DPR RI DALAM MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT DI DAERAH PEMILIHAN PADA MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Sekretari & Administrasi*, 18(2), 24–34.
- Arianto, B. (2016). Fenomena Relawan Politik dalam Kontestasi Presidensial 2014. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 18(2), 130. <https://doi.org/10.22146/jsp.13128>
- Asshiddiqie, J. (2006). Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 3(4), 6–27. [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/BOOK\\_Volume3 nomor4Des2006.pdf#page=7](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/BOOK_Volume3 nomor4Des2006.pdf#page=7)
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Hasil Sensus Penduduk 2020*. BPS. <https://demakkab.bps.go.id/news/2021/01/21/67/hasil-sensus-penduduk-2020.html>
- Calderaro, A. (2014). *Internet Politics Beyond the Digital Divide* (pp. 3–17). [https://doi.org/10.1007/978-3-319-04666-2\\_1](https://doi.org/10.1007/978-3-319-04666-2_1)
- Cangara, H. (2016). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Praktik* (5th ed.). Rajawali Pers.
- Chadwick, A. (2006). *Internet Politics: States, Citizen, and New Communication Technologies*. Oxford University Press.
- Fadli, I. (2019). *Gandeng ICW, PSI Bekali 67 Anggota Legislatif Terpilih Agar Tidak Korupsi*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/politik/gandeng-icw-psi-bekali-67-anggota-legislatif-terpilih-agar-tidak-korupsi.html>
- Farazian, T. A., & Paskarina, C. (2021). Political marketing in the 2019 local election: A case of the Indonesia solidarity party in the legislative election in Jakarta. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 10(5), 1–11. <https://doi.org/10.36941/ajis-2021-0119>
- Fauzi. (2021). *Puspoll: Tingkat Kepercayaan Publik pada DPR dan Parpol Terendah*. Antara. <https://www.antaranews.com/berita/2171106/puspoll-tingkat-kepercayaan-publik-dpr-dan-parpol-terendah>
- Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. (2021). *Refleksi 20 Tahun Formappi Mengkritisi DPR*. Formappi. <http://parlemenindonesia.org/wp-content/uploads/2021/09/3.-REFLEKSI-20-TAHUN-FORMAPPI-MENGRITISI-DPR.pdf>
- Gerbaudo, P. (2018). *The digital party: political organisation and online democracy*. Pluto Press. [https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/en/publications/the-digital-party\(3b493088-e395-4251-9860-3fa7b64e8c16\).html](https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/en/publications/the-digital-party(3b493088-e395-4251-9860-3fa7b64e8c16).html)

- Gerbaudo, P. (2019). *The platform party: The transformation of political organisation in the era of big data*. <https://www.uwestminsterpress.co.uk/site/books/10.16997/book29/download/2524/#page=192>
- Halim, D. (2019). *Tak Lolos ke DPR, PSI Jadikan Pemilu 2019 Modal untuk Pemilu Berikutnya*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/21/12144241/tak-lolos-ke-dpr-psi-jadikan-pemilu-2019-modal-untuk-pemilu-berikutnya>
- Harjanto, N. (2011). Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia. *Analisis CSIS*, 40(2), 138–159. <https://www.academia.edu/download/36869050/harjanto-politik-kekerabatan.pdf>
- Hartiana, T. I. P., Setyarinata, A. W., & Nugraheni, Y. (2020). Citra politik Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo di media sosial. *Profesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 4(2), 155. <https://doi.org/10.24198/prh.v4i2.21319>
- Haryono, C. G. (2020). Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi. In *Jejak* (1st ed., Vol. 1). Jejak Publisher. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=7RwREAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Ragam+Metode+Penelitian+Kualitatif&ots=WtN4UbP\\_Ci&sig=4ddH0USc804m0JdIc6OouqnGCOs&redir\\_esc=y#v=onepage&q=Ragam+Metode+Penelitian+Kualitatif&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=7RwREAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Ragam+Metode+Penelitian+Kualitatif&ots=WtN4UbP_Ci&sig=4ddH0USc804m0JdIc6OouqnGCOs&redir_esc=y#v=onepage&q=Ragam+Metode+Penelitian+Kualitatif&f=false)
- Kemp, S. (2021). *Digital in Indonesia: All the Statistics You Need in 2021 — DataReportal — Global Digital Insights*. We Are Social. <https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia>
- Kuswarno, E. (2017). Potret Wajah Masyarakat Digital Indonesia. *Jurnal Communicate*, 1(1), 47–54. <https://doi.org/10.31479/JC.V1I1.36>
- McNair, B. (2017). An introduction to political communication: Sixth edition. In *An Introduction to Political Communication: Sixth Edition*. <https://doi.org/10.4324/9781315750293>
- Nadlir, M. (2018). *PSI Targetkan Dapat Sumbangan Rp 1 Triliun dari 1 Juta Donatur Setiap Tahun*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/19/23122281/psi-targetkan-dapat-sumbangan-rp-1-triliun-dari-1-juta-donatur-setiap-tahun>
- Partai Solidaritas Indonesia. (2021). *Tentang PSI – Partai Solidaritas Indonesia*. PSI.Id. <https://psi.id/tentang-psi/>
- Pratiwi, A. (2018). Representasi Citra Politik Harry Tanoesoedibjo (Studi Semiotika Roland Barthes Dalam Video Mars Partai Perindo). *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 11(2), 17. <https://doi.org/10.14421/pjk.v11i2.1426>
- Priasmoro, M. (2018). *Survei Charta Politika: Kepercayaan publik terhadap parpol masih rendah* | merdeka.com. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/politik/survei-charta-politika-kepercayaan-publik-terhadap-parpol-masih-rendah.html>
- Putri, B. (2021). *Survei LSI Soal Kepercayaan Publik: DPR dan Parpol Urutan Paling Buncit - Nasional* Tempo.co. Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1435647/survei-lsi-soal-kepercayaan-publik->

Silvanus Alvin:

The Evolution of Political Party in Indonesia: PSI Towards a Digital Party

Evolusi Partai Politik di Indonesia: Studi Kasus PSI Menuju Partai Digital

dpr-dan-parpol-urutan-paling-buncit

Ramadhan, A. (2020). *Peringati HUT ke-6, PSI Akan Luncurkan Aplikasi yang Dijanjikan pada Pemilu 2019*. Kompas.Com.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/31/15405771/peringati-hut-ke-6-psi-akan-luncurkan-aplikasi-yang-dijanjikan-pada-pemilu>

*Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*, (2011) (testimony of Republik Indonesia).

Robin, P., Fendista, S., & Adiwinata, A. (2020). Manuver dan Momentum Politik Joko Widodo: Analisis Wacana Kritis #JKWVLOG. *Calathu: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 43–58. <https://doi.org/10.37715/calathu.v2i1.1259>

Saptanti, E. I. (2020). Analisis Manajemen Impresi Ma'ruf Amin dalam Debat Pilpres 2019. *Ultimacomm: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(2), 262–284. <https://doi.org/10.31937/ultimacomm.v12i2.1573>

Sucahyo, N. (2019). *Relawan Politik: Mereka yang Terpanggil untuk Bergerak*. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/relawan-politik-mereka-yang-terpanggil-untuk-bergerak-/4877691.html>

Uzunoglu, S. (2019). Interview With Paolo Gerbaudo on Digital Parties: The Era of Hyper-leaders and Start-up Parties. *Moment Dergi*, 6(2).

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications. Sixth Edition*. Sage Publication.